









BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR

Jl. Gayung Kebonsari No. 56 No.56 – Telp.(031) 8290738 – 8290719 Fax. 8290719 Surabaya 60235

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Dengan selesainya penyusunan **Dokumen Rencana Strategis Perubahan Kedua BALITBANG Provinsi Jawa Timur 2019-2024**, tiada yang lebih pantas dilakukan kecuali memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanallahu Wata'alaa, Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia yang telah dicurahkan kepada kita semua.

Rencana Strategis Perubahan Kedua BALITBANG Propinsi Jawa Timur 2019-2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD Perubahan) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Dokumen Perubahan Renstra akan menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan dan acuan target yang ingin dicapai BALITBANG Propinsi Jawa Timur sampai dengan tahun 2024 dengan memperhitungkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan yang ada.

Seluruh jajaran BALITBANG Provinsi Jawa Timur diharapkan untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Perubahan Kedua BALITBANG Provinsi Jawa Timur 2019-2024 sehingga BALITBANG Provinsi Jawa Timur bisa menjadi yang terdepan dalam bidang penelitian dan pengembangan di Jawa Timur.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surabaya, April 2023

KEPALA BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

Pembina Utama Muda

NIP. 19660609 199001 1 001

DAFTAR ISI

]	Halaman
KATA PE	NGAN	TAR	i
DAFTAR 1	ISI		ii
DAFTAR '	ГАВЕ	L	. iii
DAFTAR	GAME	BAR	iii
BAB I	PENI	DAHULUAN	
	1.1	Latar Belakang	
	1.2	Landasan Hukum	3
	1.3	Maksud dan Tujuan	. 6
	1.4	Sistematika Penulisan	. 7
BAB II	GAM	IBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	9
	2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	. 9
	2.2	Sumber Daya Perangkat Daerah	19
	2.3	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	. 21
	2.4	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
		Perangkat Daerah	34
BAB III	PERI	MASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	35
	3.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Ĺ
		Pelayanan Perangkat Daerah	. 35
	3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan	
		Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
	3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra	42
	3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian	
		Lingkungan Hidup Strategis	44
	3.5	Penentuan Isu – isu Strategis	. 45
BAB IV	TUJU	JAN DAN SASARAN	. 47
	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	. 47
BAB V	STRA	ATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	. 50
BAB VI	REN	CANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA	
	PENI	DANAAN	54
BAB VII	KINI	ERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	. 111
BAB VIII	PEN	UTUP	95

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Status Kepegawaian Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2021	20
Tabel 2.2	Pangkat dan Golongan	20
Tabel 2.3	Tingkat Pendidikan	20
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	24
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	. 26
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	
	Pembangunan Daerah	36
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat	
	Daerah	48
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	51
Tabel 6.1	Program dan Kegiatan Tahun 2019	55
Tabel 6.2	Program dan Kegiatan Tahun 2020	62
Tabel 6.3	Program dan Kegiatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Balitbang Provinsi Jawa Timur yang Mengacu	
	pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	112
Tabel 7.2	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang	
	Mendukung Nawabhakti	114

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi BALITBANG Provinsi Jawa Timur	11

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya baik untuk jangka waktu lima tahun maupun satu tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disebut dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) harus memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur, perlu melakukan perubahan Renstra 2019-2024. Beberapa hal yang melatarbelakangi perubahan Renstra tersebut adalah adanya kebijakan nasional terkait terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Intervensi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembanguna Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 79 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur; Keputusan Gubernur Jawa dan Timur nomor 188/22/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

Perubahan terhadap peraturan tersebut membawa dampak terhadap Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Balitbang. Sebagai tidak lanjut perubahan organisasi tersebut pada tanggal 31 Desember 2021 dilakukan pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Balitbang oleh Gubenur Jawa Timur. Dalam sambutanya Gubernur mengamanatkan beberapa hal kepada para pejabat struktural Balitbang yang telah dilantik, diantaranya adalah agar Balitbang dapat memberikan respon cepat terhadap pengentasan kemiskinan melalui *quick research* dan inovasi.

Atas perubahan tersebut, Balitbang Provinsi Jawa Timur selaku Perangkat Daerah perlu melakukan perubahan Renstra sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya sampai dengan periode berakhirnya RPJMD Tahun 2024. Perubahan Renstra yang dilakukan antara lain mencakup:

- penyesuaian tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
- penyempurnaan tujuan dan sasaran PD berdasarkan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
- 3. penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan;
- 4. penyempurnaan indikator dan target kinerja.

Adapun yang menjadi kendala dalam menyusun perubahan ini adalah bagaimana menata kembali penjabaran strategi dan arah kebijakan Balitbang, rencana program dan kegiatan serta pendanaan penyelenggaraan tugas dan fungsi serta sasaran kinerja penyelenggaraan urusan bidang yang sesuai dengan nomenklatur baru sekaligus menjawab isu-isu strategis yang akhir-akhir ini terjadi.

Proses penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah meliputi (1) persiapan penyusunan (2) penyusunan Rancangan Awal (3) penyusunan Rancangan (4) penyusunan Rancangan Akhir, dan (5) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 04 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2016 tentang Paten;
- 5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
 Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor
 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4815);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengemdalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
 Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;
- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

- Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- 23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi
 Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 070 Tahun 2011 tentang Pokok Pokok Kode Etik Peneliti di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 26. Peraturan Daerah 2009 Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tentang Rencana Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
- 27. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 2031;
- 28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 2019
- 29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

- 30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 102);
- 31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor x Seri x, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor xx).
- 32. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur;
- 33. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/22/KPTS/013/2022 tentang Tugas Kelompok Sub-Substansi dan Tugas Sub-Koordinator di Lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Perubahan Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah:

- menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Balitbang Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2019-2024;
- menetapkan program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Balitbang Provinsi Jawa Timur selama periode tahun 2019-2024 berdasarkan Peraturan Gubenur Jawa Timur Nomor 79 tahun 2021 serta relevansi terhadap tuntutan kondisi yang didasarkan atas isu-isu strategis yang terjadi.

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra BALITBANG Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah:

 menjadi pedoman dan acuan dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang berkualitas dan terukur dalam mencapai target RPJMD tahun 2019– 2024;

- 2. sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Balitbang Provinsi Jawa Timur;
- 3. memberikan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Balitbang Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.

1.4. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan Renstra Perubahan Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

BAB 1. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

- BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN
- BAB 7. KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB 8. PENUTUP

BAB 2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Perubahan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2020 dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021 membawa dampak terhadap Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Balitbang. Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021, Balitbang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat yang membawahi 1 (satu) sub bagian dan 4 (empat) bidang.

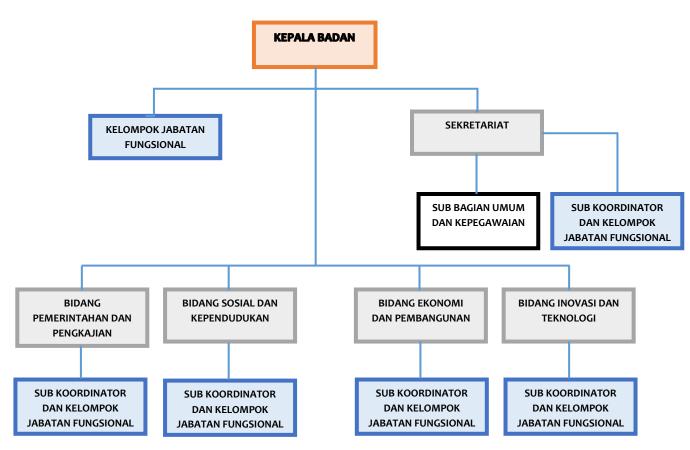
Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
- 2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Pemerintahan Provinsi;
- 3. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi lingkup Pemerintahan Provinsi;
- 4. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Pemerintahan Provinsi;
- 5. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Provinsi;
- 6. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- 7. fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan kabupaten/kota;
- 8. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
- 9. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Pemerintahan Provinsi;
- 10. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Provinsi; dan

11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 79 Tahun 2021 adalah sebagai berikut dan diperlihatkan sebagaimana Gambar 2.1.

- 1. Kepala Badan;
- 2. Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional;
- 3. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;
- 4. Bidang Sosial dan Kependudukan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 6. Bidang Inovasi dan Teknologi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
- 7. UPT; dan
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balitbang Provinsi Jawa Timur

Tugas dan Fungsi Sekretariat serta masing-masing Kepala Bidang di lingkungan BALITBANG Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1. Tugas dan Fungsi Sekretariat
 - Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, hubungan masyarakat dan protokol.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundangundangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di

- bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- j. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- k. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tatalaksana; dan
- 1. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 2. Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- e. pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
- f. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan dan pengkajian peraturan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 3. Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan dalam penelitian di bidang Sosial dan Kependudukan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Sosial dan Kependudukan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- c. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan kependudukan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan

- pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan kependudukan;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan kependudukan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.
- 4. Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- e. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.
- 5. Bidang Inovasi dan Teknologi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang Inovasi dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- b. penyusunan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
- pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- d. pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- f. pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- g. pelaksanaan uji terap di bidang inovasi dan teknologi;
- h. pengoordinasian pembinaan teknis penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama. Sub Koordinator melaksanakan tugas membantu pejabat administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

2.1.1 Pengorganisasian Kelitbangan

Berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, Balitbang didukung oleh pejabat struktural dan fungsional yang dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan juga didukung oleh:

- a. Majelis Pertimbangan (MP);
- b. Tim Pengendali Mutu (TPM); dan
- c. Tim Kelitbangan.

Majelis Pertimbangan (MP)

MP bertugas untuk:

- a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
- b. memberikan pertimbangan pemanfaatan kelitbangan; dan

c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

MP beranggotakan, Gubernur (Ketua), Sekretaris Daerah Provinsi (Wakil Kepala Badan Litbang Provinsi Ketua), atau lembaga yang kelitbangan menyelenggarakan fungsi (Sekretaris), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi (Anggota). Dalam hal tertentu selaku Majelis Pertimbangan, Gubernur dan Sekretaris Daerah Provinsi dapat melimpahkan tugasnya kepada pejabat lain dibawahnya. Majelis Pertimbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. MP ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dalam melaksanakan tugasnya, MP mengadakan sidang sekurang-kurangnya setahun sekali untuk menetapkan rencana seluruh kelitbangan. Uraian tugas masing-masing adalah sebagai berikut:

- Ketua bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- b. Wakil Ketua bertugas membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan MP;
- c. Sekretaris bertugas mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan MP; dan
- d. Anggota bertugas melaksanakan kebijakan dan prosedur operasi kegiatan MP.

Tim Pengendali Mutu (TPM)

TPM bertugas untuk:

- a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
- b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
- c. memberikan saran dan masukan kepada majelis pertimbangan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
- d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan. TPM dibentuk untuk setiap jenis kelitbangan yang beranggotakan Kepala Badan Litbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Penanggung jawab), Sekretaris Badan Litbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi

kelitbangan (Ketua), dan Tenaga Ahli/Pakar/Praktisi dan Pimpinan/Administrator pada Lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan (Anggota). TPM ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk. Dalam melaksanakan tugasnya, TPM mengadakan sidang sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelitbangan.

Tim Kelitbangan (TK)

Tim Kelitbangan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Tim Kelitbangan meliputi Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang:

1. Unsur Pelaksana

Unsur Pelaksana bertugas untuk:

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;
- b. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan kepada Kepala Balitbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Unsur Pelaksana beranggotakan:

- a. Pengarah, adalah Pejabat Fungsional Keahlian tingkat Madya atau
 Pejabat Tinggi Pratama/Pejabat Administrator;
- Ketua, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas yang ditugaskan;
- c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas, Ahli/Pakar/Praktisi, dan tenaga lainnya.

2. Unsur Penunjang

Unsur Penunjang bertugas untuk:

- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan tahapan kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan, dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan di lingkungan pusat litbang;

- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada pemerintahan daerah;
- e. menjaga penyelenggaraan kelitbangan agar dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kelitbangan kepada Kepala Balitbang Provinsi atau lembaga yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan.

Unsur Penunjang beranggotakan:

- a. Penanggung Jawab, adalah Pejabat Administrator terkait;
- b. Sekretaris, adalah Pejabat Pengawas terkait;
- c. Anggota, adalah Pejabat Fungsional Keahlian atau Pejabat Administrator/Pejabat Pengawas, ahli/pakar/praktisi, dan tenaga lainnya.

2.1.2 Tata Laksana

Tata laksana kelitbangan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2016, diatur sebagai berikut:

2.1.1. Kelitbangan

Kelitbangan melalui tahapan:

- 1. perencanaan;
- 2. pelaksanaan;
- 3. pemantauan;
- 4. evaluasi; dan
- 5. pelaporan.

Kelitbangan itu sendiri terdiri atas:

- a. Kelitbangan Utama, meliputi:
 - 1. penelitian;
 - 2. pengkajian;
 - 3. pengembangan;
 - 4. perekayasaan;
 - 5. penerapan;

- 6. pengoperasian; dan
- 7. evaluasi kebijakan.

Kelitbangan utama dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

- b. Kelitbangan Pendukung, antara lain melalui:
 - 1. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - 2. penguatan ketatalaksanaan;
 - 3. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 4. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
 - 5. fasilitasi inovasi daerah;
 - 6. pengembangan basis data kelitbangan;
 - 7. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
 - 8. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

2.1.2. Kegiatan Penunjang

Dalam rangka mendukung kelitbangan diperlukan kegiatan penunjang, melalui:

- Fasilitasi, dilakukan melalui konsultasi, koordinasi, dan diseminasi.
- b. Advokasi, dilakukan melalui forum pakar/tenaga ahli dan pendampingan.
- c. Asistensi, dilakukan melalui lokakarya, kolaborasi, dan penyuluhan
- d. Supervisi, dilakukan melalui pengarahan, pembimbingan, dan pengendalian.
- e. Edukasi, dilakukan melalui bimbingan teknis, adopsi, dan modifikasi.

2.1.3. Rencana Kerja Kelitbangan

Balitbang menyusun Rencana Kerja Kelitbangan:

- a. Rencana Induk Kelitbangan, untuk jangka waktu 5
 (lima) tahun; dan
- b. Rencana Kerja Tahunan.

Rencana Kerja Kelitbangan disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek antara lain:

- a. kebijakan dan program terkait;
- b. metode;
- c. waktu;
- d. lokasi;
- e. kelembagaan;
- f. sumber daya manusia aparatur;
- g. sarana prasarana;
- h. fasilitas pendukung; dan
- i. pembiayaan.

Rencana Kerja Kelitbangan disusun dengan memperhatikan arahan Majelis Pertimbangan dengan mengikutsertakan para pemangku kepentingan.

Rencana induk kelitbangan wajib dimasukkan dan menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan wajib dimasukkan menjadi bagian dari RPJMD.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia kelitbangan berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 terdiri dari:

- a. jabatan fungsional keahlian; dan
- b. tenaga lainnya.

Jabatan fungsional keahlian meliputi:

- a. pejabat fungsional peneliti;
- b. pejabat fungsional perekayasa;
- c. pejabat fungsional analis kebijakan
- d. pejabat fungsional statistisi; dan

- e. pejabat fungsional lainnya yang terkait dengan fungsi Tenaga lainnya meliputi:
- a. aparatur sipil negara yang diangkat dalam jabatan administrator, pengawas, dan pelaksana.
- b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK)

Dukungan ketersediaan sumber daya manusia berkualitas, profesional, berpengetahuan serta berpengalaman dalam mengelola suatu organisasi atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan oleh kinerja sumber daya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan fungsinya masingmasing.

Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang berdasarkan masing-masing komposisi tergambarkan sebagai berikut:

a. Status

Keseluruhan sumber daya manusia di Balitbang Provinsi Jawa Timur berjumlah 85 orang dengan status kepegawaian terbagi atas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap dengan Perjanjian Kinerja (PTT-PK) sebagaimana Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Status Kepegawaian Balitbang Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

No	Status Kepegawaian	Jumlah
1	ASN	77
2	PTT-PK	7
	Jumlah	84

b. Pangkat dan Golongan

ASN Balitbang Provinsi Jawa Timur berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 ASN Balitbang Provinsi Jawa Timur berdasarkan Pangkat dan Golongan

	3010118411	
No	Pangkat dan Golongan	Jumlah

1	Golongan IV	25
2	Golongan III	44
3	Golongan II	8
4	Golongan I	-
	Jumlah	77

c. Tingkat Pendidikan

PNS Balitbang Provinsi Jawa Timur berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tertera pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3 Tingkat Pendidikan PNS Balitbang Provinsi Jawa Timur

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah
1	SD/sederajat	-
2	SMP/sederajat	1
3	SMA/sederajat	1
4	D-1	-
5	D-3	-
6	S-1	44
7	S-2	27
8	S-3	4
	Jumlah	77

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Pelayanan Vertikal

Jenis pelayanan yang diberikan secara vertikal dalam hal ini kepada Gubernur berupa rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil dari kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian dan pengkajian aktual, pengembangan, perekayasaan, *policy brief* yang mulai dikembangkan sebagai respon tuntutan Gubernur dalam pemenuhan *quick research*), inovasi dan teknologi.

b. Pelayanan Horisontal

Pelayanan horisontal Balitbang diberikan kepada PD dalam bentuk pembinaan fungsional dan konsultasi tentang penyelenggaraan kelitbangan pemerintahan daerah, rekomendasi menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pada tahun 2019 mulai dirintis pelayanan perolehan hak kekayaan intelektual yang diimplementasikan melalui pendirian Sentra HKI.

Selain pelayanan tersebut Balitbang juga memberikan informasi melalui diseminasi/publikasi hasil kelitbangan melalui :

- 1. penyediaan fasilitas perpustakaan yang menyajikan referensi tentang kelitbangan dan hasilnya;
- 2. pameran hasil kelitbangan serta pengembangan inovasi dan teknologi;
- 3. gelar inovasi teknologi yang diselenggarakan sebagai sarana publikasi hasil inovasi teknologi dari berbagai unsur di daerah Jawa Timur;
- 4. fasilitasi pendampingan pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI);
- 5. E-Jurnal Litbang Cakrawala yang terbit setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- 6. Buletin Teropong yang terbit 2 (dua) bulan sekali.

c. Pelayanan Kepada Masyarakat.

Walupun Balitbang adalah PD yang bertugas menunjang penyelenggaraan urusan pemeritahan daerah namun dalam hal tertentu yang terkait dengan pembinaan kelitbangan, inovasi dan teknologi, Balitbang juga menyelenggarakan tugas pelayanan langsung kepada masyarakat. Pelayanan ini diberikan dalam bentuk pemberian penghargaan "Inotek Award" dalam kategori:

- 1. Inovasi Daerah, yang dapat berbentuk Inovasi Tatakelola Pemerintahan, Inovasi Pelayanan Publik, Inovasi lainnya yang sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota. Kategori ini diperuntukkan atas nama Perangkat Daerah Kabupaten/Kota maupun ASN secara pribadi (perorangan maupun kelompok).
- 2. Inovasi Teknologi Berbasis Web/Mobile Apps. Kategori ini diperuntukkan atas nama kelompok/tim dan masyarakat perorangan.
- 3. Inovasi atau inovasi teknologi dibidang ekonomi. Kategori ini diperuntukkan atas nama kelompok/tim dan masyarakat perorangan.
- 4. Inovasi atau inovasi teknologi non ekonomi. Kategori ini diperuntukkan atas nama kelompok/tim dan masyarakat perorangan.

5. Perangkat Daerah Kabupaten/kota Penyelenggara Fungsi Kelitbangan dan Inovasi yang berkomitmen dan kreatif mengelola inovasi daerah sebagai upaya peningkatan daya saing daerah.

Selain dalam rangka pembinaan, Balitbang juga merintis kegiatan yang diarahkan kepada fasilitasi hasil inovasi masyarakat/kelompok/daerah..

d. Pelayanan Kemitraan

Balitbang Provinsi Jawa Timur menjalin kemitraan, koordinasi dan jejaring kerja dengan:

- Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur;
- Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
- Lembaga Penelitian PTN/PTS di Jawa Timur;
- Lembaga Kelitbangan Kementerian/Non Kementerian di Jawa Timur.

Dalam hal penguatan jaringan kelitbangan, Balitbang memfasilitasi forum diskusi dan difusi hasil Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Sosial dan Budaya (PPD IPTEK SB) yang beranggotakan seluruh komponen penelitian dan pengembangan dari berbagai organisasi dan perguruan tinggi. Selain forum tersebut dalam rangka memberikan wadah bagi para peneliti Balitbang juga memfasilitasi kegiatan Temu Ilmiah Peneliti baik berskala lokal maupun nasional.

e. Pelayanan di Bidang Informasi dan Komunikasi

Diseminasi hasil penelitian dan pengembangan serta kajian dilakukan melalui penerbitan e Jurnal Litbang CAKRAWALA http://cakrawalajournal.org/index.php/cakrawala, Buletin Litbang TEROPONG dan website Balitbang http://www.balitbang.jatimprov.go.id. Selain itu juga terdapat Perpustakaan yang menyediakan buku-buku hasil penelitian dan pengembangan dan buku referensi penunjang kegiatan penelitian.

Capaian kinerja BALITBANG melalui pelaksanaan Renstra sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

NO	Indikator Kinerja sesuai	Target	Target	arget Target Indikato									isasi aian	Ra Capa	Ketera	
NO	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	NSPK	SPM	IKK			2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2019	2020	ngan
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan				V	30	50	50				75,61	76,47	2.52	1.53	
2	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan				V	75	77	79				89.13	100	1.19	1.30	
3	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan				V	2	2	2				2	4	1	2.00	
4	Predikat Inovasi Daerah				V				Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif					
5	Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan				V				9	9	9					
6	Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah				V				10	10	10					
7	Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah				V				30	30	30					
8	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah				V	81.15	81.17	82.37	82.38	82.39	82.40	81.15	81.17	81.15	81.17	

Tabel di atas menjabarkan tentang pencapaian Kinerja Balitbang pada tahun 2019 dan 2020. Sebagaimana dapat dlihat pada tabel di atas, Balitbang memiliki 3 (tiga) indikator yang digunakan dalam pengukuran kinerja, yaitu:

- a. Indikator Tujuan:
 - 1. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan
- b. Indikator Sasaran:
 - 1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan
 - 2. Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan

Secara umum, realisasi indikator kinerja pada tahun 2019-2020 telah memenuhi target. Target indikator persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan dapat dicapai dengan maksimal pada tahun 2020 disebabkan oleh meningkatnya komunikasi dan koordinasi Balitbang dengan stakeholder sehingga kegiatan kelitbangan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah atau Kabupaten/Kota dan bermanfaat sebagai solusi pemecahan masalah yang ada.

Indikator jumlah inovasi daerah yang dikembangkan juga dapat dicapai melampaui target yang diinginkan pada tahun 2020. Hal ini disebabkan pada saat pandemi COVID-19 Balitbang fokus untuk mengembangkan inovasi dalam penanganan COVID-19 dengan melakukan kerjasama dengan Perguruan Tinggi.

Selain itu, pada tabel tersebut juga disampaikan perubahan indikator tujuan dan sasaran Balitbang pada tahun 2022-2024, yaitu:

- a. Indikator Tujuan:
 - 1. Predikat Inovasi Daerah
- b. Indikator Sasaran:
 - 1. Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan
 - 2. Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah
 - 3. Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah
 - 4. Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 2.5. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

No	Program/		Ang	garan Tah					Realisasi Ar						io Reali				ke-		-rata nbuhan
No	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
3.10.01 00.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,550,626 ,350	0	0	0	0	0	1,500,11 9,600	0	0	0	0	0	1.03						-0.86	-0.86
3.10.01 00.01. 019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	1,550,626 ,350	0	0	0	0	0	1,500,11 9,600	0	0	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.01 00.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2,925,134 ,000	0	0	O		0	2,759,0 42,840	0	0	0	0	0	1.06						-0.74	-0.86
3.10.0 100.02 .012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1,867,276 ,000	0	0	0	0	0	1,731,91 8,683	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.0 100.02 .031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	1,057,858 ,000	0	0	0	0	0	1,027,12 4,157	0	0	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.01 00.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	1,052,034 ,000	0	0	0	0	0	990,89 5,312	0	0	0	0	0	1.06						-0.86	-0.86
3.10.0 100.07 .001	Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah	592,350, 000	0	O	0	0	0	564,34 3,112	O	0	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86

No	Program/		Ang	garan Tah	un ke-			F	Realisasi Ar	nggaran T	ahun l	ce-		Rasi	io Reali	ke-	Rata-rata Pertumbuhan				
	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
3.10.0 100.07 .002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	459,684, 000	0	0	0	0	0	426,55 2,200	0	0	0	0	0	1.08	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.01 00.08	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraa n Pemerintahan	691,094,6 50	0	0	0	0	0	613,889 ,297	0	0	0	0	0	1.13	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.0 100.0 8.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	520,499, 650	0	0	0	0	0	476,63 2,078	0	0	0	0	0	1.09	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.0 100.0 8.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	87,000,0 00	0	0	0	0	0	61,590, 219	0	0	0	0	0	1.41	0	0	0	0	0	-o.86	-0.86
3.10.0 100.0 8.003	Penyusunan, Pengembang an, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	55,800,0 00	0	0	0	0	0	48,401, 000	0	0	0	0	0	1.15	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.0 100.0 8.004	Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan	27,795,00	0	0	0	0	0	27,266, 000	0	0	0	0	0	1.02	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86

No	Program/		Anggaran Tahun ke-						tealisasi Ar	nggaran T	ahun l	ke-		Rasi	io Reali	ke-	Rata-rata Pertumbuhan				
NO	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
3.10.01 00.77	Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakatan	2,250,00 0,000	1,255,8 63,710	0	0		0	2,247,0 27,000	0	0	0	0	0	1.00						-0.62	-0.86
3.10.0 100.77 .001	1 Penelitian Pemerintaha n	1,263,000 ,000	682,92 0,060	0	0	0	0	1,260,2 65,050	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	-0.74	-0.86
3.10.0 100.77 .002	2 Penelitian Kemasyaraka tan	987,000, 000	572,943 ,650	0	0	0	0	986,76 1,950	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	0	-0.73	-0.86
3.10.01 00.78	Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2,250,00 0,000	852,764 ,825	0	0	0	0	2,208,1 54,551	0	0	0	0	0	1.02	0	0	0	0	0	-0.76	-0.86
3.10.0 100.78 .001	1 Penelitian Ekonomi	1,165,000 ,000	270,00 0,000	0	0	0	0	1,131,74 3,641	0	0	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	-0.79	-0.86
3.10.0 100.78 .002	2 Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1,085,00 0,000	582,76 4,825	0	0	0	0	1,076,4 10,910	0	0	0	0	0	1.01	0	0	0	0	0	-0.74	-0.86
3.10.01 00.80	Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan	4,716,595 ,000	1,048,6 48,758	0	0	0	0	4,533,0 30,845	0	0	0	0	0	1.04						-0.79	-0.86
3.10.0 100.8 0.001	1 Diseminasi Hasil Penelitian	1,946,00 0,000	778,652 ,558	0	0	0	0	1,888,2 24,748	0	0	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	-0.76	-0.86

No	Program/		Angg	garan Tah	un ke-			F	Realisasi Ar	nggaran T	ahun l	ke-		Ras	io Reali:	sasi-An	ggaran	Tahun	ke-		n-rata nbuhan
No	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
3.10.0 100.8 0.002	2 Inovasi Teknologi Terapan	2,770,595 ,000	269,99 6,200	0	0	0	0	2,644,8 06,097	0	0	0	0	0	1.05	0	0	0	0	0	-0.83	-0.86
3.10.01 00.81	Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah	3,950,00 0,000	0	0	0	0	0	3,776,7 44,951	0	0	0	0	0	1.05	0	O	0	0	0	-0.86	-0.86
3.10.0 100.81 .001	1 Kemitraan Kelitbangan	1,889,719 ,700	137,186, 200	0	0	0	0	1,769,3 19,973	0	0	0	0	0	1.07	0	0	0	0	0	-0.83	-0.86
3.10.0 100.81 .002	2 Sistem Inovasi Daerah	2,060,28 0,300	0	0	0	0	0	2,007,4 24,978	0	0	0	0	0	1.03	0	0	0	0	0	-0.86	-0.86
TAHUN	2020																	<u> </u>	L		
3.10.01 00.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	O	6,326,2 26,316	0	0	0	0	0	5,425,7 05,488	0	0	0	0	0	1.17	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.0 8.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	0	523,834 ,726	0	0	0	0	0	392,46 2,207	0	0	0	0	0	1.33	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.0 8.001	Pengelolaan Administrasi Keuangan	0	532,00 4,726	0	0	0	0	0	553,45 2,250	0	0	0	0	0	0.9 6	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.0 8.001	Ketatausahaa n dan Kepegawaian	0	5,270,3 86,864	0	0	0	0	0	4,479,7 91,031	0	0	0	0	0	1.18	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.01 00.77	Program Penelitian Pemerintahan	0	1,255,8 63,710	0	0	0	0	0	1,179,65 8,800	0	0	0	0	0	1.06	0	0	0	0	-0.51	-0.51

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun ke-							Realisasi Ar		Ras	io Reali		ı-rata nbuhan							
NO		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
	dan Kemasyarakatan																				
3.10.0 100.77 .001	1 Penelitian Pemerintaha n	0	682,92 0,060	0	0	0	0	0	637,26 4,260	0	0	0	0	0	1.07	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.77 .002	2 Penelitian Kemasyaraka tan	0	572,943 ,650	0	0	0	0	0	542,39 4,540	0	0	0	0	0	1.06	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.01 00.78	Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	0	852,764 ,825	0	0	0	0	0	802,961 ,000	0	0	0	0	0	1.06	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.78 .001	1 Penelitian Ekonomi	0	270,00 0,000	0	0	0	0	0	245,196 ,600	0	0	0	0	0	1.10	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.78 .002	PenelitianSumber DayaAlam danLingkunganHidup	0	582,76 4,825	0	0	0	0	0	557,76 4,400	0	0	0	0	0	1.04	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.01 00.80	Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan	0	1,048,6 48,758	0	0	0	0	0	976,56 6,174	0	0	0	0	0	1.07	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.8 0.001	1 Diseminasi Hasil Penelitian	0	778,652 ,558	0	0	0	0	0	708,36 8,502	0	0	0	0	0	1.10	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.8 0.002	2 Inovasi Teknologi Terapan	0	269,99 6,200	0	0	0	0	0	268,197 ,672	0	0	0	0	0	1.01	0	0	0	0	-0.51	-0.51

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun ke-							Realisasi Ar		Ras	io Reali		-rata nbuhan							
NO		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
3.10.01 00.81	Program Pengembangan Kemitraan dan Inovasi Daerah	0	1,213,96 1,207	26,873, 502,32 4	0	0	0	0	1,074,11 9,815	0	0	0	0	0	1.13	0	0	0	0	-0.19	-0.51
3.10.0 100.81 .001	1 Kemitraan Kelitbangan	0	137,186, 200	0	0	0	0	0	137,186 ,200	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	-0.51	-0.51
3.10.0 100.81 .002	2 Inovasi Daerah	0	1,076,7 75,007	0	0	0	0	0	1,074,11 9,815	0	0	0	0	0	1.00	0	0	0	0	-0.51	-0.51
TAHUN	2021																				
551	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	0	0	26,387, 645,00 0	0	0	o	0	0	3,985, 804,37 3	0	0	0	0	0	0.15	O	0	0	-0.17	-0.17
55111	1 Perencanaan, Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	485,85 7,324	0	0	0	0	0	18,493 ,696	0	0	0	0	0	0.0 4	0	0	0	-0.17	-0.17
55112	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	21,991, 348,91 0	0	0	0	0	0	3,435, 600,6 07	0	0	0	0	0	0.16	0	0	0	-0.17	-0.17
55115	3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	416,29 0,765	0	0	0	0	0	11,403, 800	0	0	0	0	0	0.03	0	0	0	-0.17	-0.17
55116	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	0	0	792,04 1,978	0	0	0	0	0	125,72 3,668	0	0	0	0	0	0.16	0	0	0	-0.17	-0.17

No	Program/ Kegiatan	Anggaran Tahun ke-							Realisasi Aı		Rasi	io Reali	Rata-rata Pertumbuhan								
140		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
55117	5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	88,000	0	0	0	O	0	o	0	0	0	0	0	0.0	0	0	0	-0.17	#DIV/ o!
55118	6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	0	0	2,176,2 24,023	0	0	0	0	0	300,9 94,602	0	0	0	0	0	0.14	0	0	0	-0.17	-0.17
55119	7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintaha n Daerah	0	0	437,88 2,000	0	0	0	0	0	93,588	0	0	0	0	0	0.21	0	0	0	-0.17	-0.17
552	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	0	0	6,865,7 33,000	0	0	0	O	0	159,63 2,081	0	0	0	0	0	0.02	0	0	0	-0.17	-0.17
55211	1 Penelitian dan Pengembang an Bidang Penyelenggar aan Pemerintaha n dan Pengkajian Peraturan	0	0	1,300,0 00,000	0	0	0	0	0	159,63 2,081	0	0	0	0	0	0.12	0	0	0	-0.17	-0.17

No Program/ Kegiatan Anggaran Tahun ke-							F	Realisasi Ar	nggaran T	ahun l	ke-		Rasio Realisasi-Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan			
	Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Angga ran	Realis asi
55212	2 Penelitian dan Pengembang an Bidang Sosial dan Kependuduk an	0	0	1,300,0 00,000	0	0	0	0	0	80,54 8,950	0	0	0	0	0	0.0 6	0	0	0	-0.17	-0.17
55213	3 Penelitian dan Pengembang an Bidang Ekonomi dan Pembanguna n	0	0	1,500,0 00,000	0	0	0	0	0	139,09 3,400	0	0	0	0	0	o.o 9	0	0	0	-0.17	-0.17
55214	4 Pengembang an Inovasi dan Teknologi	0	0	2,765,7 33,000	0	0	0	0	0	341,10 2,248	0	0	0	0	0	0.12	0	0	0	-0.17	-0.17

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam merancang kebijakan strategisnya, BALITBANG Provinsi Jawa Timur dipandang perlu untuk mengetahui tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan. Tantangan dan peluang tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- 2. Perencanaan pembangunan harus berbasis research;
- 3. Perintah lisan Gubernur yang disampakan pada acara pengukuhan dan pelantikan pejabat struktural di lingkungan Balitbang Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan *quick research* dalam rangka *quick respons* terhadap kondisi pasca serangan wabah Covid-19, yang difokuskan pada pengambilan sikap Pemerintah Provinsi dalam menghadapi permasalahan ketenagakerjaan, penganggaran JPS bagi UKM dan pemetaan kebutuhan Sekolah Menengah Atas di Jawa Timur.
- 4. Peningkatan kesadaran dan tuntutan masyarakat akan pelayanan kelitbangan yang lebih baik, serta dinamika lingkungan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, menuntut adanya perumusan kebijakan secara lebih terintegrasi, tepat sasaran dan implementatif, untuk menjawab berbagai permasalahan di Provinsi Jawa Timur.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Balitbang Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang penelitian dan pengembangan. Dalam melaksanakan tugasnya Balitbang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Pemerintahan Provinsi;
- c. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi lingkup Pemerintahan Provinsi;
- d. pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Pemerintahan Provinsi;
- e. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Provinsi;
- f. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- g. fasilitasi lembaga penelitian dan pengembangan kabupaten/kota;
- h. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan;
- i. pelaksanaan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi Pemerintahan Provinsi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, invensi dan inovasi di Provinsi; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan sebagai dasar untuk perumusan kebijakan pemerintahan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan	a. Hasil kelitbangan kurang rekomendatif atau kurangnya minat stakeholder untuk memanfaatkan hasil kelitbangan	 Terbatasnya jumlah dan ragam kegiatan kelitbangan Hasil kelitbangan kurang aplikatif untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Belum optimalnya keterlibatan stakeholder pengusul dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan
		b. Pengembangan inovasi daerah dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah belum optimal	 Terbatasnya jumlah pengembangan inovasi dan teknologi Belum maksimalnya difusi inovasi dan penerapan teknologi Belum optimalnya diseminasi dan fasilitasi HKI hasil kelitbangan

Pelayanan yang diberikan Balitbang berdasarkan tugas dan fungsi di atas lebih banyak diarahkan untuk memberikan masukan yang berbentuk rekomendasi. Rekomendasi tersebut merupakan hasil kegiatan kelitbangan yang akan diberikan kepada Kepala Daerah maupun PD lainnya sebagai penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Namun, selama ini pelayanan yang diberikan belum maksimal dan kurang tepat sasaran sehingga tidak banyak dimanfaatkan baik oleh Kepala Daerah maupun PD lainnya sebagai penyelenggara teknis operasional pemerintahan daerah.

Rendahnya pemanfaatan hasil kelitbangan tersebut sebenarnya tidak disebabkan oleh rendahnya kualitas hasil kelitbangan, melainkan oleh kegiatan kelitbangan yang kurang dapat merespon dengan baik kebutuhan dalam pengambilan

kebijakan sehingga tidak dapat dijadikan referensi dalam penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Permasalahan pelayanan terkait dengan fungsi Balitbang sebagai bentuk uraian tugas juga banyak yang tidak berjalan dengan baik. Permasalahan terkait fungsi tersebut diantaranya adalah berikut:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan seperti misalnya pedoman kelitbangan hanya didasarkan atas regulasi Keputusan Kepala Badan. Rencana Induk Kelitbangan (RIK) sebagai penjabaran RPJMD terkait kegiatan kelitbangan yang seharusnya dijadikan acuan dasar penyelenggaraan kelitbangan strategis daerah untuk 5 (lima) tahun sedang dalam proses penyusunan. Belum dilakukan evaluasi terhadap Roadmap SIDa 2014-2019, dan seharusnya sudah harus disusun kembali untuk periode 5 (lima) tahun selanjutnya.
- 2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi kurang terintegrasi dengan PD Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tema dan judul yang dijaring dari Rapat Koordinasi Kelitbangan kurang dapat merespon kebutuhan atau permasalahan yang dihadapi.
- 3. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintahan Provinsi belum berjalan dengan baik. Seharusnya pelaksanaan kegiatan kelitbangan dirumuskan bersama dengan tim yang melibatkan PD terkait sehingga kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan bisa tuntas dan dapat dieksekusi oleh PD yang berkepentingan.
- 4. Fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan inovasi daerah yang dilakukan oleh Balitbang belum optimal. Balitbang menghimpun dan mengembangkan inovasi yang dilakukan oleh masyarakat, PD, dan Perguruan Tinggi.
- 5. Balitbang belum membuat panduan untuk perangkat daerah lainnya dan membina teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan, karena ada kegiatan yang memang menjadi bagian dari kegiatan perangkat daerah lainnya seperti penyusunan naskah akademik dan penyusunan petunjuk operasional sebagai bentuk perekayasaan penyelenggaraan pemerintah daerah tertentu.

- 6. Pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan pernerintahan provinsi belum dapat diselenggarakan dengan baik, mengingat Balitbang belum memiliki data induk kelitbangan. Data tersebut berisi hasil kegiatan kelitbangan yang dilaksanakan oleh Balitbang sendiri maupun instansi lain di Provinsi Jawa Timur.
- 7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi belum dilaksanakan dengan baik, karena belum ada instrumen khsusus untuk pemantauan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

Sedangkan permasalahan kelembagaan Balitbang yang terdiri dari permasalahan regulasi, organisasi, tata laksana dan sumber daya pendukung adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan Regulasi

a) Regulasi tentang penyelenggaraan kelitbangan.

Sementara ini, regulasi tentang penyelenggaraan kelitbangan daerah provinsi yang hanya diatur oleh Keputusan Kepala Badan yang membatasi penyelenggaraan tugas dan fungsi kelitbangan. Hal ini merupakan kendala bagi Perangkat Daerah lainnya untuk memenuhi kebutuhan kelitbangannya, terutama yang berkaitan dengan rekomendasi kebjakan. Akibatnya beberapa Perangkat Daerah tidak memanfaatkan hasil kelitbangan Balitbang dan tidak jarang mereka menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sendiri untuk memnuhi kebutuhannya. Untuk menonjolkan peran Balitbang sebagai perangkat daerah yang berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaran kelitbangan daerah provinsi, seharusnya ada regulasi penyelenggaraan kelitbangan yang dijadikan pedoman penyelenggaraan kelitbangan daerah provinsi yang diatur oleh Peraturan Gubernur.

b) Regulasi terkait penyelenggaraan Inovasi Daerah

Provinsi Jawa Timur belum memiliki regulasi terkait penyelenggaraan Inovasi Daerah. Regulasi ini penting bagi Balitbang sebagai *leading sector* di bidang Inovasi Daerah karena berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2019, Balitbang memperoleh amanah untuk mengelola Inovasi Daerah. Walaupun tugas ini pada awalnya bersifat delegatif namun dengan muculnya ketentuan dalam PP Nomor 38 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun

2016 dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017, posisi Balitbang menjadi jelas sebagai pengelola utama. Dengan latar belakang tersebut, maka Balitbang perlu menyusun rancangan regulasi tentang pengelolaan Inovasi Daerah sebagai ajuan Peraturan Daerah.

2. Permasalahan Organisasi

Walaupun secara organisatorik struktur Balitbang sudah disesuaikan dengan Permendagri Nomor 5 Tahun 2017, namun masih terdapat permasalahan pengorganisasian kelitbangan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah belum optimalnya fungsi Majelis Pertimbangan serta Tim Kelitbangan belum merepresentasikan kebutuhan.

a) Belum optimalnya fungsi Majelis Pertimbangan

Majelis Pertimbangan belum menjalankan fungsinya secara maksimal terutama dalam memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan mengingat belum disusunnya rencana induk kelitbangan Provinsi Jawa Timur. Disamping itu, MP juga kurang memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan sehingga pemanfaatan hasil kelitbangan juga belum optimal.

b) Tim Kelitbangan belum merepresentasikan kebutuhan.

Seringkali pembentukan Tim Kelitbangan belum merepresentasikan kebutuhan. Tim Kelitbangan dibentuk tidak berdasarkan formula yang seharusnya, namun biasanya dibentuk berdasarkan rumpun kepakarannya. Selain itu, dalam melaksanakan tugasnya seringkali dikerjakan sendiri walaupun mereka adalah tim, sehingga hasilnya tidak maksimal namun.

3. Permasalahan Tata Laksana

Tata laksana penyelenggaraan kelitbangan menjadi salah satu sumber pemasalahan yang mengakibatkan tidak rekomendatifnya hasil kelitbangan. Permasalahan yang ada terkait dengan tata laksana anatara lain:

a) Balitbang belum memiliki Rencana Induk Kelitbangan (RIK) yang berfungsi sebagai acuan rencana kerja kelitbangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, akibatnya kegiatan kelitbangan yang dilakukan kurang terarah. Misalnya, banyak kegiatan kelitbangan yang tidak difokuskan untuk menunjang penyelenggaran pemerintahan daerah provinsi melainkan kabupaten/kota; b) Belum adanya instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan kelitbangan yang jelas sehingga belum ada ukuran atau standar hasil kelitbangan yang bermutu.

4. Permasalahan Sumberdaya Manusia Kelitbangan

Permasalahan sumberdaya manusia kelitbangan adalah keterbatasan jenis jabatan fungsional keahlian dan terbatasnya bidang kepakaran pejabat fungsional Peneliti yang ada. Seharusnya kegiatan kelitbangan didukung oleh berbagai jenis jabatan fungsional keahlian yang terdiri dari Peneliti, Perekayasa, Analis Kebijakan dan jabatan fungsional lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan fungsi kelitbangan.

Disamping permasalahan kelembagaan yang ada permasalahan lain adalah Balitbang belum dapat secara maksimal menghasilkan inovasi walaupun berdasarkan aturan perundangan Balitbang adalah pengelola inovasi daerah. Sebenarnya Balitbang dapat lebih berbuat banyak dalam inovasi dan teknologi, meningat inovasi dan teknologi adalah salah satu sektor yang dapat meningkatkan daya saing. Kunci utama membangun kemandirian daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Peran inovasi dan teknologi sangat penting dalam menumbuhkan aset dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif untuk dapat menjadi sumber keunggulan daerah (resource advantage), memperkuat rantai pertambahan nilai produksi agar citra dan pangsa pasar produk yang ditopang hasil inovasi dan teknologi, memiliki daya saing di pasar nasional maupun global (positional advantage) dan dapat mengatasi berbagai bentuk persaingan yang melemahkan posisi tawar, sehingga secara berkelanjutan dapat memperbarui sumber keunggulan (positional advantage). Kemampuan inovasi dan teknologi yang dimiliki oleh suatu daerah sangat menentukan daya saingnya dalam kancah perdagangan regional, nasional maupun internasional.

Oleh karena itu pembangunan Jawa Timur memerlukan dukungan penelitian, pengembangan inovasi dan teknologi agar dapat meningkatkan daya saing dan kemandirian menghadapi persaingan global. Meski demikian, tidak berarti inovasi dan teknologi hanya diorientasikan semata pada pembangunan industri, tetap juga harus memberi prioritas kepada penelitian sosial kemanusiaan. Disamping hal itu, kesatuan inovasi daerah dalam sebuah sistem harus diperhatikan. *Roadmap* SIDa Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 harus dievaluasi dan disusun kembali sesuai dengan tema yang relevan saat ini.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memiliki visi "Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong" yang tercantum di dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur 2019 – 2024 dan mempunyai 4 (empat) misi, antara lain:

- **Misi ke 1** : Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor dan Keterhubungan Wilayah
- Misi ke 2 : Terciptanya Kesejahteraan yang Berkeadilan Sosial, Pemenuhan Kebutuhan Dasar Terutama Kesehatan dan Pendidikan, Penyediaan Lapangan Kerja dengan Memperhatikan Kelompok Rentan
- Misi ke 3 : Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka,
 Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk
 Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip
 Kebhinekaan
- Misi ke 4 : Melaksanakan Pembangunan Berdasarkan Semangat Gotong Royong, Berwawasan Lingkungan untuk Menjamin Keselarasan Ruang Ekologi, Ruang Sosial, Ruang Ekonomi dan Ruang Budaya

Dalam mendukung program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur, BALITBANG menyelenggarakan **Misi ke–3** dari RPJMD Provinsi Jawa Timur dan mendukung tujuan "*Terwujudnya Pemerintahan yang Baik*" BALITBANG juga memberikan dukungan terhadap sasaran "*Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel*" di dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur."

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BALITBANG Provinsi Jawa Timur memiliki kaitan dengan Renstra Kemendagri terutama yang ada pada Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri.

Tujuan strategis Badan Litbang Kemendagri Tahun 2020-2024, yang terkait dengan Balitbang Provinsi Jawa Timur yaitu:

- 1. Peningkatan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri (T1).
- 2. Pendayagunaan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan oleh stakeholder (T2).
- 3. Pembinaan pelaksanaan inovasi daerah (T3).
- 4. Penguatan tata kelola penyelenggaraan penelitian dan pengembangan (T4).

Untuk mewujudkan T1, ditetapkan sasaran strategis, yaitu: Meningkatnya kualitas hasil penelitian dan pengembangan, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:

- 1. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri.
- 2. Peningkatan jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang masuk dalam jurnal ilmiah.
- 3. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 4. Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah.
- 5. Kerjasama penelitian dan pengembangan.

Untuk mewujudkan T2, ditetapkan sasaran strategis 'meningkatnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri', dengan indikator sasaran strategis, yaitu:

- a. pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan.
- b. Meningkatnya keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam perumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:Keterlibatan Badan Litbang Kemendagri dalam penyusunan kebijakan.

Untuk mewujudkan T3, ditetapkan sasaran strategis:

- a. Tersedianya kebijakan penyelenggaraan inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Jumlah kebijakan inovasi daerah yang dihasilkan.
- b. Peningkatan jumlah daerah yang berinovasi, dengan indikator sasaran strategis, yaitu Daerah yang menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan inovasi daerah berdasarkan indeks inovasi daerah.
- c. Meningkatnya kualitas inovasi daerah, dengan indikator sasaran strategis, Persentase daerah dengan kategori "inovatif" dan "sangat inovatif" berdasarkan peta pembinaan inovasi daerah.

Untuk mewujudkan T4, ditetapkan sasaran strategis:

- a. Penguatan tata kelola penyelenggaraan kelitbangan, dengan indikator sasaran strategis:
 - Terselenggaranya rencana program dan anggaran Badan Litbang Kemendagri berpedoman pada Rencana Kerja Kemendagri.
 - 2. Tersedianya Organisasi yang optimal dan SDM yang kompeten.
- b. Pembinaan dan penguatan kelembagaan litbang daerah, dengan indikator sasaran strategis, yaitu:
 - 1. Jumlah kelembagaan penelitian dan pengebangan daerah yang berkategori "utama".
 - 2. Terfasilitasinya rencana induk kelitbangan daerah.
 - 3. Terfasilitasinya penyediaan sumber daya manusia fungsional kelitbangan daerah.

Berdasarkan sasaran strategis BPP Kemendagri tersebut, faktor penghambat dan faktor pendorong Balitbang Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut: Faktor Penghambat:

- 1. Hasil kelitbangan kurang rekomendatif atau kurangnya minat stakeholder untuk memanfaatkan hasil kelitbangan
- 2. Belum optimalnya pengembangan inovasi daerah dalam menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Faktor Pendorong:

- 1. Adanya regulasi yang menyebutkan bahwa hasil penelitian dan pengembangan dijadikan dasar dalam perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintah daerah
- 2. Balitbang mengkoordinasikan pelaksaanaan inovasi guna meningkatkan daya saing daerah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031 memuat tujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan melalui sistem agropolitan dan sistem metropolitan. Adapun kebijakan penataan ruang wilayah meliputi pengembangan wilayah, struktur ruang, pola ruang dan kawasan strategis.

Kebijakan pengembangan wilayah provinsi meliputi:

- a. pemantapan sistem perkotaan pusat kegiatan nasional (PKN) sebagai kawasan metropolitan di Jawa Timur;
- b. peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Jawa Timur dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan.

Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan sistem pusat pelayanan;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah provinsi meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budi daya;
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Kebijakan pengembangan kawasan strategis provinsi meliputi:

- a. pengembangan kawasan ekonomi potensial yang dapat mempercepat perkembangan wilayah;
- b. percepatan perkembangan dan kemajuan kawasan tertinggal untuk mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antarkawasan;

- pemantapan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan wilayah nasional di provinsi;
- d. pemantapan dan peningkatan fungsi dan peran kawasan sosial dan budaya;
- e. pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- f. pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, serta melestarikan keunikan bentang alam.

Kajian Lingkungan Hidup Stategis (KLHS) merupakan proses integrasi pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan/atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan program. Adapun isu strategis KLHS RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024 adalah sebagai berikut:

- a. Kualitas Lingkungan Permukiman, Kesehatan dan Sanitasi
- b. Sumber Daya Air dan Kekeringan
- c. Konflik Pemanfaatan Lahan Pertanian dan Hutan
- d. Kemiskinan dan Permasalahan Sosial (Pendidikan, hukum, dan konflik sosial)

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis BALITBANG mengacu kepada isu-isu strategis yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

- 1. Infrastruktur dasar yang merata dan berkualitas serta prinsip pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan
- 2. Internalisasi demokrasi kewarganegaraan dalam ruang publik (public shere) yang antidiskriminasi

- 3. Tata kelola pemerintahan yang partisipatif dan inklusif
- 4. Penguatan konektivitas antar wilayah
- 5. Perluasan akses lapangan pekerjaan
- 6. Penguatan kedaulatan pangan berbasis masyarakat
- 7. Pembangunan sumber daya manusia secara utuh berbasiskan nilai keagamaan dan kebudayaan
- 8. Kesejahteraan social yang berkeadilan
- 9. Ketimpangan antar kelompok pendapatan dan antar wilayah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa visi — misi merupakan sebuah kondisi ideal yang hendak diwujudkan pada akhir periode perencanaan sebuah pembangunan. Karena itulah, dalam jangka menengah aktivitas pembangunan harus dirangkai dalam sebuah tujuan dan sasaran yang dapat mendukung tercapainya visi — misi Perangkat Daerah selama periode tahun 2019 sampai tahun 2024.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah BALITBANG Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dijabarkan pada tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

							KINEI	RJA TUJI	U AN/SAS	ARAN		
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	20	19	202	0		TARGET	KINERJA	L
			TUJUAN/ SASARAN		TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	2021	2022	2023	2024
Renst	ra 2019-2024											
1	Meningkatkan pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	Persen	50	50	50	50	50	75	75	75
	pemerintahan	Meningkatnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	Persen	75	75,61	77	76,47	79	81	83	85
		Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang belum optimal	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	Inovasi daerah	2	2	2	4	2	2	2	2
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,15	82,35	81,15	82,36	81,16	81,17	81,18	81,19

							KINE	RJA TUJ	UAN/SAS	ARAN		
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR THUMAN/GAGARAN	SATUAN	20	19	202	0		TARGET	KINERJA	1
			TUJUAN/ SASARAN		TARGET	REALI SASI	TARGET	REALI SASI	2021	2022	2023	2024
Renst	a Perubahan 2019-2024											
1	Meningkatnya kualitas inovasi daerah		Predikat Inovasi Daerah	Predikat	-	-	-	-	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif
		Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan	Dokumen	-	-	-	-	-	9	9	9
			2. Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah	Artikel	3	6	3	8	3	10	10	10
		Meningkatnya kuantitas inovasi daerah	Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah	Inovasi daerah						30	30	30
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,15	82,35	81,15	8/2,36	82.37	82.38	82.39	82.40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Arah Kebijakan Balitbang Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini:

RENSTRA PERUBAHAN KEDUA BALITBANG PROVINSI JAWA TIMUR 2019 — 2024

Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI: Terwujudnya Masyarakat Jawa Timur Yang Adil, Sejahtera, Unggul, dan Berakhlak dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Partisipatoris Inklusif melalui Kerja Bersama dan Semangat Gotong Royong

MISI : (MISI ke-3) Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Inovatif, Terbuka, Partisipatoris Memperkuat Demokrasi Kewargaan untuk Menghadirkan Ruang Sosial yang menghargai prinsip Kebhinekaan

	ang Sosiai yang menghargai pri		T
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
RENSTRA 2019-2024			
Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	1.1 Meningkatkan hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan	1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan	 1.1 Penyediaan hasil penelitian dan pengembangan yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan daerah di Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan; Ekonomi, SDA, dan LH; Teknologi Terapan, Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah 1.2 Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah
	1.2 Mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah	2.1 Mengembangkan inovasi potensi unggulan daerah	2.1 Memfasilitasi pengembangan inovasi daerah
	1.3 Meningkatnya akutabilitas kinerja Perangkat Daerah	3.1 Menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Balitbang Provinsi Jawa Timur	3.1 Penyediaan pelayanan kesekretariatan Balitbang Provinsi Jawa Timur

RENSTRA PERUBAI	HAN 2019-2024		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas inovasi daerah	1.1 Meningkatnya kualitas hasil kelitbangan	1.1 Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kelitbangan	 1.1 Penyediaan policy brief berbasis hasil kelitbangan sesuai dengan kebutuhan daerah di Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan; Sosial dan Kependudukan; Ekonomi dan Pembangunan; serta, Inovasi dan Teknologi 1.2 Meningkatkan sinkronisasi dan sinergitas perencanaan kelitbangan dengan Perangkat Daerah 1.3 Mempublikasikan hasil kelitbangan pada jurnal ilmiah
	1.2 Meningkatnya kuantitas inovasi daerah	2.1 Meningkatkan diseminasi, dan difusi inovasi dan teknologi untuk meningkatkan daya saing	Melakukan diseminasi dan difusi hasil kelitbangan 2.2 Memfasilitasi pengembangan inovasi daerah
	1.3 Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	daerah 3.1 Menyelenggarakan pelayanan kesekretariatan Balitbang Provinsi Jawa Timur	3.1 Penyediaan pelayanan kesekretariatan Balitbang Provinsi Jawa Timur

Program Prioritas Pembangunan dalam RPJMD merupakan manifestasi dari Nawa Bhakti Satya yang merupakan Visi Politik Kepala Daerah terpilih sebagai komitmen kepada rakyat Provinsi Jawa Timur. Terkait dengan hal tersebut, maka perlu diidentifikasi Program Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Janji Politik pada saat kampanye Nawa Bhakti Satya.

Nawa Bhakti Satya merupakan komitmen dan sekaligus rencana aksi untuk mewujudkan visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, yang selanjutnya menjadi Visi pembangunan dalam Rerncana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024. Kesembilan Bhakti tersebut selanjutnya menjadi pijakan dalam menyusun Program Prioritas pembangunan daerah sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatan di Perangkat Daerah.

Balitbang sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya termasuk kedalam Bhakti-8: Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi," dengan Program icon Penelitian dan Pengembangan. Diharapkan melalui kegiatan kelitbangan mampu memberikan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan atau permasalahan Pemerintah Daerah.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program yang merupakan instrumen kebijakan berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu Perangkat Daerah sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran suatu organisasi. Sedangkan kegiatan adalah merupakan kegiatan operasional dari program yang bertolok ukur dan berkinerja serta dilaksanakan setiap tahun. Adapun rencana program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 dapat dilihat pada tabel 6.1, tabel 6.2, dan tabel 6.3 berikut ini:

Tabel 6.1. Program dan Kegiatan Tahun 2019

				Indikator Kinerja		Targe	et Kinerja Prog	ram dan Kerangka	a Pendanaan	Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/	Satuan	Ki	inerja	Angg	garan	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Tiegiuuni	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31001 00	Badan Penelitian dan Pengembangan					19,385,484,000	18,628,904,396		
Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan				Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	Persen	30	30			Badan Penelitian dan Pengemban gan	
	Meningkatkan hasil penelitian dan pengembanga n yang dimanfaatkan			Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	Persen	75	89.13				
		3.0.10. 0100.7 7	Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakata n	Persentase hasil penelitian pemerintahan dan kemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	Persen	75	90.91	2,250,000,000	2,247,027,000	Badan Penelitian dan Pengemban gan	Jawa Timur
		31077 001	Penelitian Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	6	5	1,263,000,000	1,260,265,050		

				Indikator Kinerja		Targe	t Kinerja Progi	ram dan Kerangka	n Pendanaan	Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/	Satuan	Ki	nerja	Angg	garan	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			regiutun	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31077 002	Penelitian Kemasyarakatan	Jumlah dokumen penelitian kemasyarakatan yang dihasilkan	Dokumen	6	6	987,000,000	986,761,950		
		3.0.10. 0100.7 8	Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase hasil penelitian ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh stakeholders	Persen	75	91.67	2,250,000,000	2,208,154,551	Badan Penelitian dan Pengemban gan	Jawa Timur
		31078 001	Penelitian Ekonomi	Jumlah dokumen penelitian ekonomi yang dihasilkan	Dokumen	6	6	1,165,000,000	1,131,743,641		
		31078 002	Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dihasilkan	Dokumen	6	6	1,085,000,000	1,076,410,910		
		3.0.10. 0100.8 0	Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan	Persentase hasil pengembangan dan teknologi terapan yang dimanfaatkan oleh stakeholders	Persen	75	100	4,716,595,000	4,533,030,845	Badan Penelitian dan Pengemban gan	Jawa Timur

				Indikator Kinerja		Targe	t Kinerja Prog	ram dan Kerangka	a Pendanaan	Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/	Satuan	Ki	nerja	Angg	garan	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			1xcgmum	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		31080 001	Diseminasi Hasil Penelitian	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan langsung ke masyarakat	Dokumen	3	8	1,946,000,000	1,888,224,748		
				Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang terpublikasi pada jurnal	Dokumen	6	6				
		31080 002	Inovasi Teknologi Terapan	Jumlah hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi model	Dokumen	6	4	2,770,595,000	2,644,806,097		
				Jumlah inovasi teknologi unggulan hasil penganugerahan	Inovasi	15	15				
	Mengembang kan Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur			Persentase OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	Persen	13	13.43				Jawa Timur

				Indikator Kinerja		Targe	t Kinerja Prog	ram dan Kerangka	Pendanaan	Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/	Satuan	Ki	nerja	Angg	aran	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Regiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.0.10. 0100.8 1	Program Pengembangan Kemitraan dan Sistem Inovasi Daerah	Persentase OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur (%)	Persen	13	13.43	3,950,000,000	3,776,744,951	Badan Penelitian dan Pengemban gan	Jawa Timur
		31081 001	Kemitraan Kelitbangan	Jumlah kerjasama yang ditindaklanjuti	Kerjasama	2	2	1,889,719,700	1,769,319,973		
		31081 002	Sistem Inovasi Daerah	Jumlah OPD Provinsi yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	OPD Provinsi	4	9	2,060,280,300	2,007,424,978		
				Jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki kegiatan mendukung Sistem Inovasi Daerah Jawa Timur	Kab/Kota	12	14				
		3.10.0	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks kepuasan masyarakat/ aparatur terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor	Persen	100	100	1,550,626,350	1,500,119,600		Jawa Timur

				Indikator Kinerja		Targe	t Kinerja Prog	ram dan Kerangka	Pendanaan	Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/	Satuan	Ki	nerja	Angg	aran	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.10.0 1.019	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Persentase pegawai yang puas terhadap pelayanan perkantoran	Persen	100	100	1,550,626,350	1,500,119,600		
		3.10.0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi	Persen	100	100	2,925,134,000	2,759,042,840	Badan Penelitian dan Pengemban gan	Jawa Timur
		3.10.0 2.012	Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang tersedia	Paket/ Unit	20	20	1,867,276,000	1,731,918,683		
		3.10.0 2.031	Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana	Jumlah peralatan dan perlengkapan sarana yang terpelihara	Paket/ Unit	20	20	1,057,858,000	1,027,124,157		
		3.10.0	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah	Persentase kelembagaan yang tepat fungsi	%	100	100	1,052,034,000	990,895,312	Badan Penelitian dan Pengemban gan	Jawa Timur
		3.10.0 7.001	Konsultasi Kelembagaan	Jumlah Konsultasi	kali	15	11	592,350,000	564,343,112		

				Indikator Kinerja		Targe	t Kinerja Progr	am dan Kerangka	Pendanaan	Unit Kerja	
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/	Satuan	Ki	nerja	Angg	aran	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi
			Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Rp.	Jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Perangkat Daerah								
		3.10.0 7.002	Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai yang mengikuti pembinaan peningkatan kapasitas SDM;	Orang	10	14	459,684,000	426,552,200		
				Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan/pelatihan formal	Orang	20	100				
		3.10.0	Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase dokumen penyelenggaraan pemerintahan yang disusun tepat waktu	9/0	100	100	691,094,650	613,889,297	Badan Penelitian dan Pengemban gan	Jawa Timur
		3.10.0 8.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	3	4	520,499,650	476,632,078		
		3.10.0 8.002	Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran	Jumlah dokumen pelaporan yang tersusun	Dokumen	4	3	87,000,000	61,590,219		

				Indikator Kinerja		Targe	t Kinerja Progi	ram dan Kerangka	a Pendanaan	Unit Kerja		
Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/	Satuan	Ki	nerja	Angg	garan	Perangkat Daerah Penanggung	Lokasi	
			Kegiatan	Kegiatan/ Sub Kegiatan		Target	Realisasi	Target	Rp.	Jawab		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		3.10.0 8.003	Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data	Jumlah update database perangkat daerah	Paket	1	1	55,800,000	48,401,000			
		8.004 Laporan pe		Jumlah dokumen laporan pengelolaan keuangan yang tersusun	Dokumen	3	4	27,795,000	27,266,000			

Tabel 6.2 Program dan kegiatan tahun 2020

			Program/	Indikator Kinerja		Target	Kinerja Pro	ogram dan Kerangl	ka Pendanaan	Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tujuan, Sasaran,Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja		Angga	aran	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	Target Realisasi		Target Realisasi		9	10
		3100100	Badan Penelitian dan Pengembangan					10,812,625,409	9,594,480,618	88.73405168	
Meningkatnya pendayagunaan hasil kelitbangan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	gunaan itbangan erumusan nn		Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	Persen	50	50			Badan Penelitian dan Pengembang an		
				Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	Persen	77	100				
		3.0.10.01 00.77	Program Penelitian Pemerintahan dan Kemasyarakata	Persentase hasil penelitian pemerintahan dan kemasyarakatan yang dimanfaatkan oleh stakeholder	Persen	77	100	1,255,864,250	1,179,658,800	Badan Penelitian dan Pengembang an	Jawa Timur
		Penelitian Pemerintahan	Jumlah dokumen penelitian pemerintahan yang dihasilkan	Dokumen	8	4	682,920,600	637,264,260			

			Program/	Indikator Kinerja Tujuan,		Target	Kinerja Pro	ogram dan Kerangl	ka Pendanaan	Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran,Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kiı	nerja	Angga	aran	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	Target	Realisasi	Target	Realisasi	9	10
		3107700 2	Penelitian Kemasyarakatan	Jumlah dokumen penelitian kemasyarakatan yang dihasilkan	Dokumen	7	3	572,943,650	542,394,540		
		3.0.10.01 00.78	Program Penelitian Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase hasil penelitian ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dimanfaatkan oleh stakeholders	Persen	77	100	852,764,825	802,961,000	Badan Penelitian dan Pengembang an	Jawa Timur
		3107800 1	Penelitian Ekonomi	Jumlah dokumen penelitian ekonomi yang dihasilkan	Dokumen	5	3	270,000,000	245,196,600		
		3107800 2	Penelitian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen penelitian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang dihasilkan	Dokumen	5	3	582,764,825	557,764,400		
		3.0.10.01 00.80	Program Pengembangan Hasil Penelitian dan Teknologi Terapan	Persentase hasil pengembangan dan teknologi terapan yang dimanfaatkan oleh stakeholders	Persen	77	100	1,048,648,758	976,566,174	Badan Penelitian dan Pengembang an	Jawa Timur

			Program/	Indikator Kinerja Tujuan,		Target	Kinerja Pro	Unit Kerja Perangkat	rangkat Daerah Lokasi anggung		
Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran,Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kiı	nerja	Angga	aran	Daerah Penanggung Jawab	Lokası
1	2	3	4	5	6	Target	Realisasi	Target	Realisasi	9	10
		3108000 1	Diseminasi Hasil Penelitian	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang didiseminasikan langsung ke masyarakat	Dokumen	6	2	778,652,558	708,368,502		
				Jumlah hasil penelitian dan pengembangan yang terpublikasi pada jurnal	Dokumen	7	3				
		3108000 2	Inovasi Teknologi Terapan	Jumlah hasil penelitian yang dapat dikembangkan menjadi model	Dokumen	7	0	269,996,200	268,197,672		
				Jumlah inovasi teknologi unggulan hasil penganugerahan	Inovasi	15	0				
	Mengembangk an sistem inovasi daerah untuk meningkatkan daya saing daerah			Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	inovasi daerah	2	4				
	3.0.10.01 Program 00.81 Pengembangan Kemitraan dan Inovasi Daerah		Persentase pengembangan kemitraan dan Inovasi Daerah yang dimanfaatkan oleh stakeholders	Persen	77	100	1,213,961,207	1,209,589,156	Badan Penelitian dan Pengembang an	Jawa Timur	

			Program/	Indikator Kinerja Tujuan,		Target	Kinerja Pro	ogram dan Kerang	ka Pendanaan	Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran,Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kir	nerja	Angg	aran	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6	Target Realisasi		Target	Realisasi	9	10
		3108100 1	Kemitraan Kelitbangan	Jumlah pengembangan kemitraan yang dihasilkan	Proposal	7	5	137,186,200	135,469,341		
		3108100 2	Inovasi Daerah	Jumlah pengembangan Inovasi daerah yang dihasilkan	Dokumen	5	4	1,076,775,007	1,074,119,815		
	Meningkatkan implementasi SAKIP Perangkat Daerah			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81.15	82,36				
		3.0.10.01 00.01	Program Pelayanan Kesekretariatan	Persentase indikator program yang tercapai	Persen	100	100	6,441,386,369	5,425,705,488	Badan Penelitian dan Pengembang an	Jawa Timur
				Persentase realisasi anggaran	Persen	95	88.63				
				Indeks profesionalitas ASN	Indeks	87.2	87.2				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran	Jumlah dokumen	Dokumen	15	10	532,004,726	392,462,207		

m ·			Program/	Indikator Kinerja Tujuan,		Target	Kinerja Pro	ogram dan Kerangl	ka Pendanaan	Unit Kerja Perangkat	
Tujuan	Sasaran	Kode	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sasaran,Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	Kinerja		Angga	aran	Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
1	2	3	4	5	6 Target		Realisasi	Target	Realisasi	9	10
			Pengelolaan Administrasi Keuangan	Jumlah dokumen	Dokumen	6	6	638,994,779	553,452,250		
			Ketatausahaan dan Kepegawaian	Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Dokumen	6	6	5,270,386,864	4,479,791,031		

Tabel 6.3 Program dan Kegiatan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2024

Tujuan	Tujuan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202		202		202)24	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		31001 00	Badan Penelitian dan Pengemban gan															
Mening katnya pendaya gunaan hasil kelitban gan dalam perumus				Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	Persen		50											
an kebijaka n pemerin tahan	Mening katkan hasil penelitia n dan pengem bangan yang dimanfa atkan			Persentase hasil penelitian dan pengembanga n yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam	Persen		79											

Tujuan Sasaran	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
		Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bolladi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				penyusunan kebijakan														
Mening katnya kualitas inovasi daerah				Predikat Inovasi Daerah	Predi kat		Sangat Inovati f	32,921 ,313,0 00	Sangat Inovatif	34,18 6,266, 000	Sangat Inovati f	34,759 ,097,0 00	Sang at Inov atif	35,29 9,952, 000	Sangat Inovatif	137,16 6,628,0 00		
	Meningkat nya hasil kelitbanga n yang berkualitas			1. Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan	Doku men				9		9		9		27			
				2. Jumlah hasil kelitbangan yang dipublikasika n dalam jurnal ilmiah	Doku men				10		10		10		30			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkat nya kuantitas inovasi daerah			3. Jumlah Inovasi yang ditetapkan menjadi Inovasi Daerah	Inovasi daerah				30		30		30		90			
		552	PROGRAM PENELITI AN DAN PENGEMB ANGAN DAERAH	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	Perse n		79	6,473, 721,40 1		6,500, 000,0 00		6,608, 915,12 8		6,711, 750,5 00		26,294, 387,03 0		
				Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Doku men				3		3		3		9			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perai Dae	Renstra 1gkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bomos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependuduka n	Doku men				3		3		3		9			
				Jumlah policy brief berbasis hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Doku men				3		3		3		9			
				Jumlah naskah jurnal	Doku men				36		36		36		108			
				Jumlah dokumen pengukuran indeks inovasi daerah dan	Doku men		2		2		2		2		8			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Sutuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bonusi
1	2	3	4	5 indeks daya	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		55211	Penelitian dan Pengemban gan Bidang Penyelengg araan Pemerintah an dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil kelitbangan Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan stakeholder			79	1,225, 774,10 0		1,300, 000,0 00		1,321, 783,02 5		1,342, 350,1 00		5,189,9 07,225	Bidang Pemerint ahan dan Pengkajia n Peratura n	Jawa Timur
				Jumlah hasil kelitbangan Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan stakeholder	Doku men				10		10		10		30			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	2011102
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah naskah jurnal Bidang Bidang Penyelenggara an Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Doku men				10		10		10		30			
		55211 01	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembang an Bidang	Jumlah dokumen litbang Bidang Penyelenggara an Otonomi Daerah	Doku men		1	125,00 0,000	1	110,0 00,00 0		111,84 3,179		113,5 83,47 0	2	460,42 6,649		
			Penyelengga raan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraa	Laporan						1		1		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		55011		n Otonomi Daerah				20121		240.0		247.60		251.0		1 400 1		
		55211 02	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi	Jumlah dokumen litbang Bidang Pemerintahan Umum	Doku men		2	386,34 1,000	2	340,0 00,00 0		345,69 7,099		351,0 76,18 0	4	1,423,1 14,279		
			Penelitian dan Pengembang an Bidang Pemerintaha n Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan						2		2		4			
		55211 08	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian	Jumlah dokumen litbang Bidang Ketatalaksanaa n Desa	Doku men		1	115,00 0,000	1	110,0 00,00 0		111,84 3,179		113,5 83,47 0	2	450,42 6,649		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			dan Pengembang an Bidang Ketatalaksan aan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaa n Desa	Lapor			100.00		100 0	1	101.65	1	1000	2	10.1.03		
		55211 09	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan		Doku men		1	100,00 0,000	1	100,0 00,00 0		101,67 5,617		103,2 57,70 0	2	404,93 3,317		
			Pengembangar Bidang Aparatur Desa	Juilliali Laparan Hasil	Lapor an						1		1		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	.2	202	23	20	024	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		55211	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembanga n Bidang Badan Usaha Milik Desa	Milik Desa Jumlah	Lapor an		1	120,00	1	135,0 00,00 0	1	137,26 2,083	1	139,3 97,89 5	2	531,65 9,978		
		55211 13	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau	Jumlah dokumen evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan	Doku men		4	379,43 3,100	4	505,0 00,00 0		513,46 1,868		521,4 51,38 5	8	1,919,3 46,353		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perai Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bollasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Reko menda si						4		4		8			
		55212	Penelitian dan Pengemban gan Bidang Sosial dan Kependudu kan	Persentase hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang dimanfaatkan stakeholder	Perse n		79	1,225, 774,12 4		1,300, 000,0 00		1,321, 783,02 6		1,342, 350,1 00	79	5,189,9 07,250	Bidang Sosial dan Kependu dukan	Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Hasil kelitbangan Bidang Sosial dan Kependuduka n yang dimanfaatkan stakeholder	Doku men Doku				9		9		9		27			
				naskah jurnal Bidang Sosial dan Kependuduka n	men													
		55212 01	Penelitian dan Pengembang an Bidang Aspek-	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Aspek- Aspek Sosial	Doku men		3	505,22 0,000	3	518,0 00,00 0		526,67 9,698		534,8 74,88 6	6	2,084,7 74,584		
			Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan	Doku men						3		3		6			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	22	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Bidang Aspek- Aspek Sosial														
		55212 03	Penelitian dan Pengembang an Pendidikan	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	Doku men		1	84,474 ,124	1	140,0 00,00 0		142,34 5,864		144,5 60,78 0	2	511,38 0,768		
			dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Doku men						1		1		2			
		55212 06	Penelitian dan Pengembanga	Jumlah dokumen hasil	Doku men		2	170,20 0,000	2	200,0 00,00		203,35 1,235		206,5 15,40	4	780,06 6,635		
			n Kesehatan	litbang Bidang Kesehatan				3,000		0		1,233		0		0,033		
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Doku men						2		2		4			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	London
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		55212 10	Penelitian dan Pengembanga n Partisipasi Masyarakat	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Partisipasi Masyarakat Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Doku men Doku men		3	465,88 0,000	3	442,0 00,00 0	3	449,40 6,229	3	456,3 99,03 4	6	1,813,6 85,263		
		55213	Penelitian dan Pengembang an Bidang Ekonomi dan Pembanguna n	Persentase hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	Persen		79	1,414, 354,75 8		1,600, 000,0 00		1,626, 809,87 8		1,652, 123,2 00	79	6,293,2 87,836	Bidang Ekonomi dan Pembang unan	Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	2011102
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Hasil kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang dimanfaatkan stakeholder	Doku men				9		9		9		27			
				naskah jurnal Bidang Ekonomi dan Pembangunan	men													
		55213 01	Penelitian dan Pengembang an Koperasi, Usaha Kecil	Jumlah dokumen hasil litbang bidang koperasi, usaha kecil dan menengah	Doku men		2	402,35 4,758	2	460,0 00,00 0		467,70 7,840		474,9 85,42 0	4	1,805,0 48,018		
			dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi,	Doku men						2		2		4			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20	024	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Usaha Kecil dan Menengah														
		55213 02	Penelitian dan Pengembang an Perindustrian dan	Jumlah dokumen hasil litbang bidang Perindustrian dan Perdagangan	Doku men		1	194,00 0,000	1	225,0 00,00 0		228,77 0,139		232,3 29,82 5	2	880,09 9,964		
			Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Doku men						1		1		2			
		55213 04	Penelitian dan Pengembang an Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Doku men		1	95,000 ,000	3	370,0 00,00 0		376,19 9,784		382,0 53,49 0	4	1,223,2 53,274		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20	024	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	2011102
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		55213	Penelitian	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan Jumlah	Doku men		1	80,000	1	225.0	3	228 77	3	222.2	6	766 00		
		55213 07	dan Pengembang an Lingkungan Hidup	Jumian dokumen hasil litbang Bidang Lingkungan Hidup Jumlah	men Doku		1	,000	1	225,0 00,00 0	1	228,77 0,139	1	232,3 29,82 5	2	766,09 9,964		
				Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	men						1		1		2			
		55213 08	Penelitian dan Pengembang	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Kehutanan	Doku men		1	194,00 0,000	1	160,0 00,00 0		162,68 0,988		165,2 12,32 0	2	681,89 3,308		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			an Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Doku men						1		1		2			
		55213 09	Penelitian dan Pengembang an Pekerjaan Umum	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Pekerjaan Umum	Doku men		1	80,000 ,000	0	-	0	-	0	-	1	80,000, 000		
		55213 10	Perhubungan	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Perhubungan	Doku men		2	289,00 0,000	1	160,00 0,000		162,68 0,988		165,21 2,320	3	776,89 3,308		
				Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Doku men						1		1		2			
		55213 12	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen hasil litbang Bidang Penataan	Doku men		1	80,000 ,000	0	-	0	-	0	-	1	80,000, 000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perai Dae	akhir Renstra	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bomos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Ruang dan Pertanahan														
		55214	Pengemban gan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan stakeholder Jumlah Pengembangan	Perse n Doku men		79	2,607, 818,41 9	8	2,300, 000,0 00	8	2,338, 539,19 9	8	2,374, 927,1 00	79	9,621,2 84,718	Bidang Inovasi dan Teknologi	Jawa Timur
				Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan stakeholder														
				Jumlah naskah jurnal pengembangan Inovasi dan Teknologi	Doku men				8		8		8		24			
				Jumlah Inovasi yang diuji coba/ diverifikasi	Inovasi				50		50		50		150			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	22	202	23	20	024	Kondisi pada periode Perai Dae	akhir Renstra	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		55214	Penelitian, Pengembanga n, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Doku men Doku men		5	940,24 0,000	8	550,0 00,00 0	8	559,21 5,895	8	567,9 17,35 0	13	2,617,3 73,245		
		55214 02	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Mode I Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Bangun/Model Replikasi dan	Doku men		3	900,00 0,000	1	950,0 00,00 0		965,91 8,365		980,9 48,15 0	4	3,796,8 66,515		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			25				1		1		2			
				Jumlah penerima anugerah Inotek Award Provinsi Jawa Timur	Inovator		27		27		27		27		108			
				Jumlah partisipasi dalam pameran	Pameran		2								2			
				Jumlah inovasi yang dilaporkan oleh Perangkat Daerah	Inovasi				50		50		50		150			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		55214 04	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah hasil litbang yang didiseminasikan	Doku men		6	447,84 5,419	6	350,00 0,000		355,86 4,661		361,40 1,950	12	1,515,11 2,030		
				Jumlah hasil litbang yang dipublikasikan pada jurnal	Artike 1		3								3			
				Jumlah edisi penerbitan jurnal	Edisi				2		2		2		6			
				Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Lapor an						6		6		12			
		55214 05	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah hasil kelitbangan dan inovasi yang didaftarkan HaKI	Doku men		5	319,73 3,000	10	450,0 00,00 0		457,54 0,278		464,6 59,65 0	15	1,691,9 32,928		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Suruan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bonusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Lapor an						10		10		20			
	Mening katnya akuntab ilitas kinerja			Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	Nilai		81.16		82.37		82.38		82.39		82.39			
	Perangk at Daerah	551	PROGRAM PENUNJA NG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang memenuhi target	Persen		100	26,447 ,591,5 99		27,68 6,266, 000		28,150 ,181,8 72		28,58 8,201, 500	100	110,87 2,240,9 71	Sekretariat	
				Persentase indikator program yang tercapai	Persen				100		100		100		100			
				Persentase realisasi anggaran	Persen				95		95		95		95			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	.2	202	23	20)24	pada periode	ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	201.402
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Indeks profesionalitas ASN	Nilai		87.3		87.4		88		88		87.6			
		55111	Perencanaan , Penganggara n, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase kegiatan Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang memenuhi target	Perse n		100	486,60 9,324		535,8 57,32 4		544,83 6,241		553,3 13,94 9	100	2,120,6 16,838	Subbag Peny. Program dan Anggaran	Jawa Timur
				Jumlah Dokumen Perencanaan dan Anggaran Perangkat Daerah	Doku men				17		13		13		43			
				Jumlah dokumen Pelaporan Perangkat Daerah	Doku men				9		8		8		25			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX. 01.1.0 1.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Doku men		6	366,19 3,720	13	405,7 77,72 0	9	412,57 7,002	9	418,9 96,74 1	37	1,603,5 45,183		
		X.XX. 01.1.0 1.02	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA	Doku men		1	5,749, 781	1	5,749, 781		5,846, 125		5,937, 092	2	23,282, 779		
			Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Doku men						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 1.03	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen RKA Perubahan	Doku men		1	5,749, 781	1	5,749, 781		5,846, 125		5,937, 092	2	23,282, 779		
			Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD	Doku men						1		1		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	.2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	201405
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD														
		X.XX. 01.1.0 1.04	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen DPA	Doku men		1	5,749, 781	1	5,749, 781		5,846, 125		5,937, 092	2	23,282, 779		
			DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Doku men						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 1.05	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah dokumen DPA Perubahan	Doku men		1	5,749, 781	1	5,749, 781		5,846, 125		5,937, 092	2	23,282, 779		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Doku men						-		1		2			
		X.XX. 01.1.0 1.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian	Jumlah dokumen Capaian Kinerja	Doku men		5	87,416 ,957	5	97,08 0,957		98,707 ,662		100,2 43,56 3	10	383,44 9,139		
			Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Lapor						4		4		8			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
		X.XX. 01.1.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi Kinerja	Doku men		4	9,999, 523	4	9,999, 523		10,167 ,077		10,32 5,277	8	40,491, 400		
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapor an						4		4		8			
		55112	Administras i Keuangan Perangkat	Persentase realisasi anggaran	Persen		95	21,981 ,508,9 10		22,25 7,743, 679		22,630 ,698,2 90		22,98 2,834, 205		89,852, 785,084	Subbag Keuangan	Jawa Timur
			Daerah	Jumlah laporan pertanggungja waban keuangan	Laporan				12		12		12		36			
		X.XX. 01.1.0 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah laporan pembayaran gaji dan tunjangan	Laporan		12	21,346 ,259,0 00	12	21,64 4,285, 265		22,006 ,960,6 61		22,34 9,391, 154	24	87,346, 896,080		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan						80		80		160			
		X.XX. 01.1.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan		12	556,65 3,231	12	534,8 61,73 5		543,82 3,971		552,2 85,92 6	24	2,187,6 24,863		
				Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumer						12		12		24			
		X.XX. 01.1.0 2.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/	Jumlah lapoan verifikasi penatausahaan	Laporan		12	17,427 ,910	12	21,97 6,811		22,345 ,058		22,69 2,750	24	84,442, 529		
			Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumer						12		12		24			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX. 01.1.0 2.04	Koordinasi dan Pelaksanaan	Jumlah Laporan akuntansi perangkat daerah			12	11,640 ,688	12	11,68 5,961		11,881 ,773		12,06 6,655	24	47,275, 077		
			Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokume n						12		12		24			
		X.XX. 01.1.0 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan		Dokum en		1	16,030 ,688	1	16,02 4,390		16,292 ,897		16,54 6,417	2	64,894, 392		
			Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordnasi Peyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Lapora n						1		1		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX. 01.1.0 2.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan		Dokum en		1	4,583, 700							1	4,583,7		
		X.XX. 01.1.0 2.07	Koordinasidan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw	Jumlah laporan keuangan	Laporan		18	17,962 ,177	18	17,95 8,637		18,259 ,555		18,54 3,676	36	72,724, 045		
			ulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwu lanan/	Laporan						18		18		36			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra ıgkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bombi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Semesteran SKPD														
		X.XX. 01.1.0 2.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis	Jumlah laporan prognosis	Laporan		1	10,951 ,516	1	10,95 0,880		11,134 ,375		11,30 7,627	2	44,344, 398		
			Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Laporan						1		1		2			
		55115	Administras i Kepegawaia n Perangkat Daerah	Persentase sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang memenuhi target	Persen		100	426,29 0,765		895,0 96,54 1		910,09 4,934		924,2 56,10 1		3,155,7 38,341	Subbag TU	Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian	Doku men				12		12		12		36			
		X.XX. 01.1.0 5.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin	Jumlah laporan presensi pegawai	Laporan		12	3,532, 888		3,532, 888		3,592, 086		3,647, 979	12	14,305, 841		
			Pegawai	Jumlah sarana dan prasana yg tepenuhi	Paket				1						1			
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 5.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah pengadaaan pakaian dinas	Paket		3	76,194 ,224	3	450,0 00,00 0		457,54 0,278		464,6 59,65 0	6	1,448,3 94,152		
			Atribut Kelengkapan nya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket						1		1		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX. 01.1.0 5.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi	Jumlah laporan pengolahan administrasi kepegawaian	Laporan		4	76,716 ,620	4	76,71 6,620		78,002 ,097		79,21 5,817	8	310,65 1,154		
			Kepegawaian	Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokume n						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 5.05	Monitoring, Evaluasi, dan	Jumlah laporan SKP yang tepat waktu	Laporan		12	13,022 ,645	12	13,02 2,645		13,240 ,855		13,44 6,884	24	52,733, 029		
			Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokume n						12		12		24			
		X.XX. 01.1.0 5.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan	Laporan		1	256,82 4,388	1	351,8 24,38 8		357,71 9,618		363,2 85,77 1	2	1,329,6 54,165		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Tugas dan Fungsi	Tugas dan Fungsi														
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang						7		7		14			
		55116	Administras i Umum Perangkat Daerah	Persentase sub kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang memenuhi target	Persen		100	811,87 7,590		926,7 29,43 3		942,25 7,872		956,9 19,49 8	100	3,637,7 84,393	Subbag TU	Jawa Timur
				Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Lapora n				11		11		11		33			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX. 01.1.0 6.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	21,950 ,000	1	21,95 0,000		22,317 ,798		22,66 5,065	2	88,882, 863		
			Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket						1		1		2			
		X.XX. 01.1.1	Penyediaan Peralatan dan	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	,000	1	40,71 0,000		41,392 ,144		42,03 6,210	2	169,04 8,354		
		6.02	Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket						5		5		10			
		X.XX. 01.1.0	Penyediaan Bahan	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	30,203 ,502	1	27,90 7,890		28,375 ,519		28,81 7,045	2	115,30 3,956		
		6.04	Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Paket						1		1		2			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode l Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Kantor yang disediakan														
		X.XX. 01.1.0 6.05	Penyediaan Barang Cetakan dan	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	29,694 ,260	1	29,69 4,260		30,191 ,822		30,66 1,610	2	120,24 1,952		
			Penggandaa n	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 6.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	265,12 2,568	1	300,1 22,56 8		305,15 1,474		309,8 99,66 1	2	1,180,2 96,271		
			Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	Doku men						8		8		16			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20	024	Kondisi pada periode Perar Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX. 01.1.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah paket pengadaan	Paket		1	16,001 ,260	1	34,96 1,260		35,547 ,077		36,10 0,193	2	122,60 9,790		
				Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Lapor an						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 6.09	Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan	Jumlah Laporan	Laporan		1	403,99 6,000	1	471,3 83,45 5		479,28 2,038		486,7 39,71 4	2	1,841,4 01,207		
			Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan						1		1		2			
		55117	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Persentase sub kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen		100	228,00 0,000		215,7 33,00 0		219,34 7,860		222,7 60,93 4	100	885,84 1,794	Subbag TU	Jawa Timur

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Zonusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Urusan Pemerintah Daerah	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memenuhi target														
				Jumlah Laporan Pengadaan Sarana dan Prasarana	Lapora n				11		11		11		33			
		X.XX.	Pengadaan	Jumlah	Paket		1	228,00	1	215,7		219,34		222,7	2	885,84		
		01.1.0 7.06	Peralatan dan Mesin	peralatan dan mesin lainnya				0,000		33,00 0		7,860		60,93 4		1,794		
			Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit						16		16		32			
		55118	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang	Persen		100	2,076, 339,02 3		2,417, 224,0 23		2,457, 727,44 9		2,495, 969,9 31	100	9,447,2 60,426	Subbag TU	Jawa Timur

Tujuan	Tujuan Sasaran l		Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	.2	202	023 2024)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra ngkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				memenuhi target														
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	an				12		12		12		36			
		X.XX. 01.1.0 8.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengiriman dokumen	Paket		1	12,970 ,000	1	12,97 0,000		13,187 ,328		13,39 2,524	2	52,519, 852		
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lapor an						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Bulan		12	382,33 0,023	12	382,3 30,02 3		388,73 6,411		394,7 85,18 8	24	1,548,1 81,645		

Tujuan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada a periode Perar Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi	
	1 2 3		Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	2011402
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Lapor						12		12		24			
		X.XX. Penyediaan 01.1.0 Jasa Peralatan 8.03 dan	Jumlah Jasa	Paket		1	31,000 ,000		268,50 0,000		272,99 9,033		277,246 ,925	1	849,74 5,958			
			Perlengkapan Kantor	Jumlah paket pelaksanaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Paket				1						1			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Lapor an						1		1		2			

Tujuan Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Kinerja pada Tujuan, Setuan Tahu)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra ıgkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi									
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		X.XX. 01.1.0 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan	Jumlah Jasa	Paket		1	1,650, 039,00 0		1,753, 424,0 00		1,782, 804,67 7		1,810, 545,2 94	1	6,996,8 12,971		
			Umum Kantor	Jumlah paket pelayanan umum kantor	Paket				1						1			
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan							1		1		2			
		55119	Pemelihara an Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memenuhi target	Persen		100	436,96 5,987		437,8 82,00 0		445,21 9,226		452,1 46,88 2	100	1,772,2 14,095	Subbag TU	Jawa Timur

Tujuan	Tujuan Sasaran	aran Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	20)24	Kondisi pada periode Peran Dae	akhir Renstra Igkat	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Bondo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah laporan aset tetap yang terpelihara	Lapor an				12		12		12		36			
		X.XX. 01.1.0 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Jasa	Paket		3	76,200 ,000	3	76,20 0,000		77,476 ,820		78,68 2,367	6	308,55 9,187		
			Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit						1		1		2			
		X.XX. 01.1.0 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,	Jumlah Jasa	Paket		4	251,73 6,987	4	251,7 00,00 0		255,91 7,529		259,8 99,63 1	8	1,019,2 54,147		

Tujuan	Tujuan Sasaran		Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	2023		2024		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi
			Sub Kegiatan	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan		n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Unit					20.40	27		27		54			
		X.XX. 01.1.0 9.06	Pemeliharaa n Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Paket		7	97,779	7	88,68 2,000		90,167 ,971		91,57 0,994	14	368,19 9,965		
				Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit						7		7		14			
		X.XX. 01.1.0 9.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara	Paket		1	11,250 ,000	1	21,30 0,000		21,656 ,906		21,99 3,890	2	76,200, 796		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan/	Indikator Kinerja Tujuan,	Satuan	Data Capai an pada Tahu	202	21	202	2	202	23	Kondisi Kinerja pada akhir 2024 periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangka t Daerah	Lokasi			
	Sub	Sasaran,Progr am/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Satuan	n Awal Peren canaa n	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Targ et	Rp.	Target	Rp.	Penang- gung- jawab	Longsi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Jumlah Gedung Kantor dan bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	Unit						1		1		2			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Adapun Indikator kinerja Badan Penelitiandan Pengembangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 – 2024 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat paa tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondis	i Awal		Target Po	erubahan		Kondisi Kinerja pada akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	periode RPJMD
1	2	3	3			1		5
Renstra	2019-2024							
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perumusan kebijakan pemerintahan	30	50	50	-	-	-	
2	Nilai evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah	81.15	81.17	83.38	83.60	83.80	84.00	84.00
3	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai referensi dalam penyusunan kebijakan	89,13	100	79	-	-	-	
4	Jumlah inovasi daerah yang dikembangkan	-	4	2	-	-	-	

No	Indikator	Kondis	i Awal		Target Po	erubahan		Kondisi Kinerja pada akhir
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	periode RPJMD
1	2	3				1		5
Renstra	Perubahan 2019-2024							
1	Predikat Inovasi Daerah	-	-	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat	Sangat Inovatif
				Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif	
2	Nilai evaluasi implementasi SAKIP	81.15	81.17	83.38	83.60	83.80	84.00	84.00
	Perangkat Daerah							
3	Jumlah policy brief berbasis hasil	-	-	-	9	9	9	27
	kelitbangan							
4	Jumlah hasil	-	-	-	10	10	10	30
	kelitbangan yang dipublikasikan							
	dalam jurnal ilmiah							
5	Jumlah Inovasi yang ditetapkan	-	-	-	30	30	30	90
	menjadi Inovasi Daerah							

Tabel 7.2 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah yang Mendukung Nawabhakti

	PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		PAGU AN	IGGARAN	
Nawa Bhakti Satya	ICON	NOMENKLATUR	NOMENKLATUR	NOMENKLATUR	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bhakti – 8 : Jatim : Jatim Amanah. "Menyelenggarakan pemerintahan yang	Penelitian dan Pengembangan	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	386,341,000	340,000,000	345,697,099	351,076,180
Bersih, Efektif dan Anti Korupsi."			Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	379,433,100	505,000,000	513,461,868	521,451,385
			Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	505,220,000	518,000,000	526,679,698	534,874,886
			Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	465,880,000	442,000,000	449,406,229	456,399,034
			Penelitian dan Pengembangan Ridang Elyanami	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	194,000,000	225,000,000	228,770,139	232,329,825
		Bidang Ekonom dan Pembangun		Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	95,000,000	370,000,000	376,199,784	382,053,490
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi		Inovasi dan	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	940,240,000	550,000,000	559,215,895	567,917,350

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Kedua BALITBANG Tahun 2019-2024 ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BALITBANG Provinsi Jawa Timur, sehingga akan lebih terarah dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan dengan output yang mendukung prioritas nasional maupun provinsi akan selalu diutamakan, selain kegiatan yang secara langsung menjadi tanggung jawab dan sesuai dengan tugas dan fungsi BALITBANG. Namun demikian, untuk hal-hal yang bersifat mendesak akan tetap dipertimbangkan untuk diprogramkan sesuai dengan skala urgensinya dan ketersediaan dukungan pembiayaannya.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan penelitian dan pengembangan juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh stakeholders. Kerja keras dari seluruh jajaran BALITBANG Provinsi Jawa Timur dan sinergitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan BALITBANG yang tertuang dalam Rencana Strategis Perubahan Kedua BALITBANG Provinsi Jawa Timur.

> Surabaya, April 2023

KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI JAWA TIMUR NTAH

-19660609 199001 1 001

